

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam buku *Tol Langit* (Kemendikbud, 2019) dijelaskan, program Pembangunan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2019-2024 menfokuskan padapenguatan sumber daya manusia (SDM). Alasan utamanya adalah, sebagai salah satu negara yang menyepakati pakta Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan besar dunia di era global saat ini.

Tantangan pertama, Indonesia menghadapi persaingan yang semakin ketat yang membutuhkan penyediaan tenaga kerja dari lulusan terampil untuk memenuhi kebutuhan di berbagai sektor industri, sektor perdagangan, sektor pariwisata maupun lapangan kerja lainnya baik untuk perusahaan nasional (negeri dan swasta) maupun perusahaan asing di negara-negara anggota. Pemberlakuan MEA menjadi tantangan pertama tenaga kerja Indonesia karena berlakunya MEA membukapeluang perpindahan manusia untuk bekerja dari suatu negara ke negara lain akan terbuka lebar.

Tantangan kedua adalah kualifikasi dan kompetensi angkatan kerja. Pada eraglobalisasi dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) kelas menengah yang unggul, dan siap kerja untuk mengisi posisi strategis di berbagai sektor industri, perdagangan, pariwisata maupun lapangan kerja lainnya. Tantangan ketiga yakni bonus demografi. Indonesia pada

tahun 2020-2030. akan didominasi oleh kategori penduduk kalangan usia produktif. Sementara jumlah penduduk usia di bawah 15 tahun dan diatas 65 tahun hanya sekitar 30 persen. Apabila pemerintah tidak mampu atau terlambat menyiapkan tenaga kerja terampil menengah hingga profesional, dimulai dari peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah, maka bisa dipastikan Indonesia hanya akan menjadi penampungan tenaga kerja terampil menengah hingga profesional dari negara- negara anggota MEA. Dampak negatif lain, tenaga kerja lokal hanya menjadi penonton.

Dalam kaitan itu, pemerintah Indonesia melakukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan melalui peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, pada 9 September 2016 telah diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Program Revitalisasi SMK dilakukan untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan dunia pendidikan dengan dunia industri, melalui pendidikan sistem ganda dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan SMK sesuai kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh Dunia Usaha-Dunia Industri (DUDI). Melalui program diharapkan terjadi perkembangan lulusan SMK, baik pengetahuan, keterampilan, maupun etos kerja dan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan DUDI (Kemendikbud, 2019).

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik simpulan bahwa SMK memainkan peran penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia mengharapkan agar lulusan SMK memainkan posisi yang strategis pada berbagai aspek, termasuk aspek pembangunan manusia, ekonomi, dan sosial.

Dari aspek pembangunan manusia, SMK mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan teknis dan praktis yang dibutuhkan oleh berbagai industri. Lulusan SMK diharapkan dapat langsung bekerja setelah lulus, sehingga membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja. Dengan memberikan pendidikan yang fokus pada keterampilan praktis dan siap kerja, SMK berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Peserta didik yang lulus dari SMK memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan umum tanpa keterampilan khusus.

Dari sudut pandang ekonomi, lulusan SMK yang terampil dan siap kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri. Ini membantu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global, karena tenaga kerja yang terampil merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, SMK sering kali bekerja sama dengan industri untuk memastikan kurikulum mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini membantu memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan *up-to-date*, sehingga dapat langsung berkontribusi dalam dunia kerja. Dengan demikian, keberadaan SMK dapat membantu pembangunan ekonomiregional dengan menyediakan tenaga kerja terampil yang dapat bekerja di industri lokal. Kehadiran lulusan SMK di daerah-daerah akan membantu mengurangi urbanisasi, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara merata, dari desa kekota.

Berbagai regulasi pemerintah telah secara khusus menyiapkan SMK

sebagai salah satu satuan pendidikan berbasis tenaga kerja. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 15 menyatakan bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik khususnya untuk bekerja pada bidang tertentu. Sementara pada Pasal 19 disebutkan bahwa kurikulum pendidikan kejuruan disusun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Regulasi penting lainnya terkait dengan SMK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan ini mengatur tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan menengah kejuruan. Beberapa aspek yang khusus berkaitan dengan SMK meliputi: (a) Pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, (b) Kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, serta (c) Fasilitas pendidikan yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 20 Tahun 2016, yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, telah ditetapkan standar kompetensi lulusan yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan, termasuk pendidikan menengah kejuruan. Standar ini mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah digariskan kerangka kerja yang menyatukan dan menyetarakan capaian pembelajaran dari berbagai jalur pendidikan, termasuk pendidikan kejuruan. KKNI bertujuan untuk mengintegrasikan pendidikan formal, non-formal, dan informal, serta hasil pengalaman kerja ke dalam satu kerangka kualifikasi nasional yang dapat diakui secara nasional dan internasional.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka peran SMK menjadi sangat strategis, terutama dalam beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, menyediakan tenaga kerja terampil. SMK mempersiapkan peserta didik dengan keterampilan teknis dan praktis yang dibutuhkan oleh berbagai industri. Lulusan SMK diharapkan dapat langsung bekerja setelah lulus, sehingga membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di pasar kerja. *Kedua*, mengurangi pengangguran. Dengan memberikan pendidikan yang fokus pada keterampilan praktis dan siap kerja, SMK berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran. Peserta didik yang lulus dari SMK memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang hanya memiliki pendidikan umum tanpa keterampilan khusus. *Ketiga*, meningkatkan daya saing ekonomi. Lulusan SMK yang terampil dan siap kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor industri. Ini membantu meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global, karena tenaga kerja yang terampil merupakan salah satu kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. *Keempat*, memenuhi kebutuhan industri. SMK seringkali bekerja sama dengan industri untuk memastikan kurikulum mereka sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja. Ini membantu memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan up-to-date, sehingga dapat langsung berkontribusi dalam dunia kerja. *Kelima*, mendukung pembangunan regional. SMK dapat membantu pembangunan ekonomi regional dengan menyediakan tenaga kerja terampil yang dapat bekerja di industri lokal. Hal ini membantu mengurangi urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota yang berdampak terhadap berbagai persoalan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Namun kondisi ideal yang diharapkan dengan hadirnya SMK dalam sistem pendidikan nasional tersebut tidak selalu berjalan sesuai harapan. Masih banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang terjadi pada lulusan SMK saat ini, antara lain sebagai berikut.

Permasalahan pertama, SMK dipandang sebagai penyumbang terbesar tingkat tingginya tingkat pengangguran terbuka usia produktif di Indonesia. Banyak lulusan SMK yang kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian mereka. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan, tingkat pengangguran lulusan SMK pada tahun 2021 mencapai 11,13%, tahun 2022 mencapai 9,42%, dan pada tahun 2023 mencapai 9,31%. Data ini lebih tinggi dari lulusan SMA Umum yang hanya 9,09% (2021), 8,57% (2022), dan 8,15% (2023).

Tabel 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pengetahuan Tertinggi yang Ditamatkan (persen) Tahun 2021-2023

Tingkat Pengetahuan	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Belum Tamat & Tamat SD	3.61	3.59	2.56
SMP	6.45	5.95	4.78

SMA umum	9.09	8.57	8.15
SMA Kejuruan	11.13	9.42	9.31
Diploma I/II/III	5.87	4.59	4.79
Universitas	5.98	4.80	5.18

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK masih merupakan yang paling tinggi dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya dalam tiga tahun terakhir (2021-2023). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan dari pengangguran sebanyak 7,99 juta di RI pada Februari 2023, 9,6persen atau sekitar 474.000 orang adalah lulusan SMK.

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (2020), mengungkapkan ada empat faktor penyebab pengangguran lulusan SMK, yakni: (1), terjadi over supply, yakni lulusan SMK jurusan tertentu jumlahnya berlebih ketimbang yang lain. (2) tidak sesuainya jurusan SMK tertentu dengan industri yang membutuhkan di wilayahnya. (3) persoalan kualitas lulusan yang tidak sesuai standar industri, dan (4) persoalan usia lulusan yang rata-rata baru 17 tahun, sehingga belum dapat langsung bekerja setelah lulus

Permasalahan regulasi yang solusinya menjadi Kewenangan pemerintah dan lembaga penyelenggara sekolah. disisi lain, berdasarkan tinjauan aspek praktis dan teoretis, sejumlah hasil penelitian menyebutkan, faktor utama terjadinya pengangguran di kalangan lulusan SMK adalah: (1) beberapa program kejuruan belum menghasilkan peserta didik yang siap bekerja dan memiliki sikap profesional dalam dunia kerja. Lulusan SMK belum memiliki kesiapan kerja dan sikap profesional yang cukup yang disebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan yang diajarkan di SMK; (2) kurangnya pengalaman menggunakan

keterampilan praktik pada saat Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan minimnya kompetensi aktual yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan industri; dan (3) kompetensi teknis lulusan SMK tidak sejalan dengan tuntutan teknologi DUDI, yang berkembang sesuai perkembangan seiring dengan era Abad21 dan Revolusi Industri 4.0. Hasil penelitian menunjukkan, lebih dari 80% lulusan SMK hanya menguasai keterampilan teknis tingkat rendah dan sedang, dan belum menguasai kompetensi Abad 21, terutama yang berkaitan langsung dengan kesiapan kerja, yakni kompetensi kritis dan kreatif. (Aprilliofany, 2020).

Permasalahan kedua, kurangnya kerjasama antara SMK dengan DUDI. Hasil studi awal peneliti menyimpulkan, banyak SMK di Jambi yang belum memiliki hubungan erat dengan industri. Dari sejumlah SMK yang ada di Jambi, hanya sekitar 70% yang memiliki kerjasama permanen dengan DUDI. Selebihnya hanya berupa kerjasama insidental yang kurang terstruktur. Hal ini menyebabkan kurangnya program PKL yang berkualitas dan pengalaman kerja praktis bagi peserta didik SMK yang mengarah pada kemampuan kerja.

Permasalahan ketiga, Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2024) perkembangan teknologi. Kurikulum yang diajarkan di SMK seringkali tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi yang cepat, membuat keterampilan yang dimiliki lulusan menjadi cepat ketinggalan. Lembaga pendidikan vokasi selalu tertinggal dengan kemajuan teknologi pada dunia industri. Pembelajaran vokasi selama ini masih kerap berulang. Contohnya, peserta didik SMK diajari dasar-dasar otomotif, kemudian ketika dia melanjutkan sekolah tinggi vokasi, pembelajaran dasar-dasar otomotif juga

kembali diajarkan. Celakanya, pada saat PKL, peserta didik SMK alih-alih mempraktikkan hal-hal baru yang dipelajarinya di sekolah, namun mereka justru lebih banyak menjadi penonton saat teknisi otomotif bekerja. Blanchard, P. N., & Thacker, J. W. (2013)

Tuwoso mengatakan, kompetensi dasar abad 21, yakni *critical thinking*, *creative thinking*, *communication*, dan *collaboration* (4 C) justru tidak menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan vokasi, termasuk SMK. Melihat kondisi yang demikian, maka pendidikan vokasi akan selamanya tertinggal dengan kemajuan teknologi DUDI di era Revolusi Industri 4.0. (Beritajatim, 2023)

Kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dengan tuntutan DUDI ini diperparah dengan terbatasnya keterlibatan mitra industri dalam pembentukan kurikulum pendidikan kejuruan (Rahayu et al., 2021). Kolaborasi yang lebih kuat antara sekolah dan DUDI sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa pendidikan kejuruan tetap responsif terhadap permintaan pasar tenaga kerja. Pengembangan kurikulum SMK juga mestinya dilakukan secara berkelanjutan dan diarahkan agar lebih selaras dengan industri. Upaya sekolah dalam memperkuat layanan bimbingan dan konseling karir, dan membina kemitraan yang permanen antara sekolah dan DUDI merupakan langkah-langkah penting menuju peningkatan kesiapan kerja peserta didik SMK secara mandiri. Sebagai langkah awal memasuki dunia kerja, individu dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta sikap guna menjadi bekal dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan, mengingat begitu banyak lulusan SMK

yang belum terserap dalam dunia kerja setiap tahunnya.

Masalah kesiapan lulusan SMK dalam bekerja merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pemerintah, sekolah, dan praktisi pendidikan agar lulusan SMK dapat terserap oleh DUDI. Hal ini menghadirkan tantangan yang besar, karena SMK dimaksudkan sebagai saluran untuk mencetak peserta didik yang siap bekerja dan pekerja terampil guna mengatasi krisis pengangguran.

Mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional dan penjelasan pasal 15 yang menyebutkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Pengertian ini mengandung pesan bahwa setiap institusi yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan harus berkomitmen menjadikan lulusannya mampu bekerja dalam bidang tertentu. Upaya mengembangkan kesiapan kerja dan menumbuhkan sikap profesional di kalangan lulusan SMK akan solusi paling efektif untuk mengurangi angka pengangguran (Christy & Suryaneta, 2022). Namun, realitasnya proses pembelajaran di SMK seringkali gagal dalam mengembangkan kesiapan kerja dan menumbuhkan sikap profesional. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti fasilitas yang belum memadai, kompetensi guru yang terbatas, dan kurangnya penekanan pada pengembangan diri, ataupun faktor-faktor lain yang sifatnya fundamental. (Nazira & Kartika, 2021).

Itulah sejumlah permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti.

Kondisi ideal yang diharapkan dari keberadaan SMK berlawanan dengan dan realitas nyata bahwa lulusan SMK merupakan penyumbang terbesar pengangguran di Indonesia. Kedua permasalahan tersebut memunculkan pertanyaan besar, yakni “Mengapa SMK sebagai institusi pendidikan yang disiapkan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap pakai justru menjadi penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia?” Permasalahan ini sangat urgen untuk segera dipecahkan, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 dan UU 20/2003 tentang Sisdiknas. Namun, tinjauan tentang hal tersebut bukanlah merupakan perkara yang sederhana.

Diperlukan langkah-langkah empiris melalui penelitian yang mendalam dan terfokus untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan kemudian memperoleh solusinya. Banyak faktor yang akan membatasi pengungkapan secara komprehensif dan mendalam. Oleh karena itu, peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian sesuai kemampuan dan keterbatasan waktu. Penelitian akan dipusatkan pada penyelenggaraan SMK di Kabupaten Batang Hari.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang ada di Batang Hari, berjumlah 9 sekolah negeri dan 2 sekolah kejuruan swasta. Penelitian hanya fokus pada peserta didik SMK Negeri di Batang Hari, yaitu SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 7, SMKN, dan SMKN SPP Jambi.

Untuk menajamkan analisis, penelitian ini menggunakan Teori Keterlibatan Peserta didik (*Student Involvement Theory*) atau SIT yang pertama kali diperkenalkan oleh A. Astin, (2004). Teori ini relevan dengan permasalahan

utama yang akan dikaji yang menyangkut pengelolaan atau manajemen pendidikan, yakni “Mengapa SMK sebagai institusi pendidikan yang disiapkan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap pakai justru menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia?”. SIT menjelaskan bagaimana *outcome* dari satuan pendidikan dikembangkan melalui keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Teori manajemen pendidikan ini lebih fokus pada usaha yang dilakukan oleh peserta didik dalam pembelajaran, daripada pada usaha yang dilakukan oleh pendidik (Hoffman, M., Snyder, T.D., & Sonneberg, 1996).

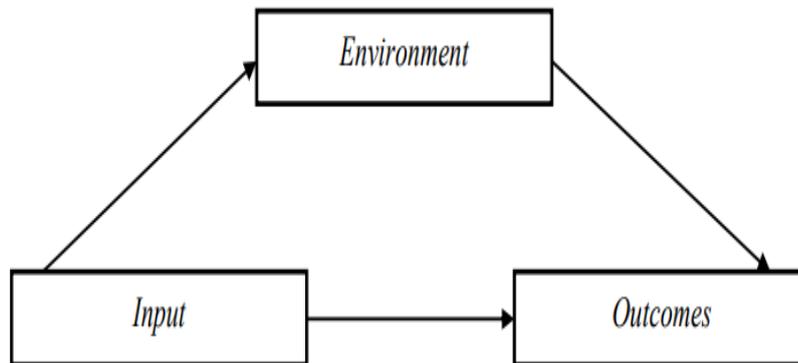
Menurut Alexander Astin (Astin, 2004) SIT lebih menekankan pada aspek manajemen perilaku peserta didik, dengan lima asumsi dasar sebagai berikut: Asumsi pertama, keterlibatan mengacu pada investasi energi fisik dan psikologis dalam berbagai "objek". Objek ini bisa jadi berupa pengalaman peserta didik. Asumsi kedua, apapun objeknya, keterlibatan peserta didik terjadi disepanjang rangkaian pembelajaran. Peserta didik yang berbeda menunjukkan tingkatan keterlibatan yang berbeda pada objek tersebut; dan peserta didik yang sama mewujudkan tingkatan keterlibatan berbeda pada objek yang berbeda di waktu yang berbeda. Asumsi ketiga, keterlibatan memiliki fitur kuantitatif dan kualitatif. Asumsi keempat, jumlah pembelajaran peserta didik dan pengembangan pribadi yang terkait dengan setiap program pendidikan berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas keterlibatan peserta didik dalam program tersebut. Asumsi kelima, efektivitas dari setiap kebijakan atau praktik berkaitan langsung dengan praktik untuk meningkatkan keterlibatan peserta

didik.

Konsep inti dari teori ini merupakan perpaduan antara tiga unsur yakni *input*, *environment*, dan *outcome*. Input secara tidak langsung atau sebagian dipengaruhi oleh lingkungan (*environment*) dalam menghasilkan *outcome*, sehingga ketiganya menjadi sebuah kolaborasi yang tepat jika dalam pembelajaran di SMK. Dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik dapat turut andil dalam memberikan input yang tepat untuk mendapatkan *outcome* yang jelas. Secara teoretis, hubungan antara *input*, *environment*, dan *outcome* dirumuskan menjadi sebuah model yang disebut Model Astin.

Menurut Model Astin, kesiapan kerja peserta didik merupakan *outcome* yang diharapkan dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan 5 asumsi dasar teori keterlibatan, *input* yang berpengaruh terhadap kesiapan kerja mencakup tiga hal: (1) Pengalaman PKL peserta didik SMK yang menunjukkan bahwa adanya investasi fisik dan psikologis dalam membentuk pengalaman selama PKL; (2) Berpikir kreatif seorang peserta didik terlihat dalam pengembangan pribadi, terkait setiap program pendidikan berbanding lurus dengan kualitas dan kuantitas keterlibatan peserta didik menjadi agen transformasi penguatan SDM dalam membangun talenta peserta didik dengan mengelola pembelajaran yang memiliki kreativitas; dan (3) Berpikir kritis ditunjukkan bahwa keterlibatan peserta didik disepanjang kontinum yang menunjukkan tingkatan berbeda, untuk meningkatkan kesiapan bekerja dan sikap profesional peserta didik berpikir kritis sangat berpengaruh dalam merespon berbagai hal di lingkungannya. Maka dari itu input mempengaruhi kesiapan kerja peserta didik, sehingga dijadikan faktor

yang mempengaruhi perkembangan kesiapan kerja peserta didik mengacu pada teori keterlibatan. Kaitan antara tiga elemen tersebut oleh Astin digambarkan dalam bentuk model berikut.



Gambar 1.1 Model I-E-O Astin (Astin, 2004)

Gambar 1 memperlihatkan hubungan antar komponen di dalam teori Astin I-E-O. Di dalam gambar tersebut terlihat bahwa *outcome* ditentukan oleh input dan *environment*: pada waktu yang sama, *input* dan *environment* juga mempengaruhi *outcome*. Astin juga menjelaskan bahwa hubungan antara *environment* dan *outcomes* tidak dapat dipisahkan pengaruhnya dari *input*, oleh karena itu untuk menciptakan *output* kesiapan kerja peserta didik diperlukan beberapa dasar input salah satunya memalalui pengalaman praktek kerja lapangan (PKL) kepada pesertadidik SMK.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang “Pengaruh Pengalaman Praktik Kerja Lapangan, Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif serta Sikap Profesional Terhadap Kesiapan Kerja Peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan: Studi Berdasarkan Student Involvement Theory Astin” perlu dilakukan. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pemikiran bagi seluruh pemegang kepentingan atau *stake holder* dalam mencari solusi penyebab

tingginya pengangguran lulusan SMK. Penelitian ini juga diharapkan menjadi landasan empiris bagi perlunya pengembangan kurikulum SMK secara berkesinambungan dan relevan dengan kebutuhan DUDI.

1.2 Pembatasan Masalah Penelitian

Permasalahan SMK sangat luas dan kompleks. Diperlukan kajian yang mendalam, komprehensif, melibatkan berbagai aspek, serta waktu yang panjang. Akan tetapi, penelitian ini dibatasi oleh waktu sumber daya, dan kemampuan. Oleh karena itu, penelitian ini hanya akan fokus pada lima variabel, yaitu: 1) pengalaman PKL yang meliputi deskripsi suatu program latihan yang diselenggarakan di lapangan atau di luar kelas, dalam rangkaian kegiatan pembelajaran sebagai bagian integral program pelatihan (Hamalik,2001:91); 2) Berpikir kreatif yang meliputi kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mengarah pada cara kita memperluas wawasan baru, dan memperluas perspektif serta pendekatan baru dalam memahami suatu permasalahan sehingga dari proses berpikir tersebut dapat menghasilkan ide-ide dari cara yang kita gunakan dalam memahami dan menyelesaikan masalah. (Anwar, 2012); 3) Berpikir kritis yang meliputi kemampuan berpikir kritis merupakan proses menganalisis, mengevaluasi, membuat solusi dan kesimpulan dari situasi atau permasalahan (Sani. 2019); 4) Sikap profesional yang meliputi perilaku seseorang dalam merespon suatu hal secara konsisten yang muncul dari kemauan dan pikirannya sendiri ketika menjalankan suatu usaha sesuai dengan ciri seorang melalui kepribadiannya (Azwar, 2012); dan 5) Kesiapan kerja yang mencakup suatu kondisi seseorang baik mental atau pun pengetahuan, yang didorong oleh

keinginan dan kemauan dirinya dengan berdasarkan peluang dan pengalamannya sehingga siap dalam bekerja (Yunita, 2020).

Ruang lingkup penelitian ini membatasi deskripsi variabel manajemen pendidikan pada kondisi peserta didik SMK di 9 SMKN yang berada di Kabupaten BatangHari, yaitu SMKN 1, SMKN 2, SMKN 3, SMKN 4, SMKN 5, SMKN 6, SMKN 7, SMKN 8, dan SMKN SPP. Data diambil dari para peserta didik yang telah mengikuti PKL, untuk tahun pelajaran 2022-2023.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah penelitian maka rumusan masalah pokok penelitian ini adalah: “Apakah terdapat pengaruh pengalaman praktik kerja lapangan, kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta sikap profesional terhadap kesiapan kerja peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)? Masalah pokok ini dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh langsung Pengalaman PKL terhadap kesiapan Kerja pada peserta didik SMKN di Batang Hari.
2. Apakah terdapat pengaruh langsung Berpikir Kreatif Terhadap Kesiapan Kerja peserta didik SMKN Di Batang Hari.
3. Apakah terdapat pengaruh langsung Berpkir kritis terhadap kesiapan Kerja peserta didik SMKN di Batang Hari.
4. Apakah terdapat pengaruh langsung Pengalaman PKL terhadap sikap Profesional pada peserta didik SMKN di Batang Hari .
5. Apakah terdapat pengaruh langsung Berpikir kreatif terhadap sikap Profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.

6. Apakah terdapat pengaruh langsung Berpikir kritis terhadap sikap Profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.
7. Apakah terdapat pengaruh langsung Sikap profesional terhadap kesiapan kerja peserta didik SMKN di Batang Hari
8. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Pengalaman PKL terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional pada peserta didik SMKN di Batang Hari.
9. Apakah terdapat pengaruh tidak langsung Berpikir kreatif berpengaruh terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.
10. Apakah terdapat pengaruh langsung Berfikir kritis terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini untuk mengetahui, menggambarkan, menganalisis, mengeksplorasi dan menguji hubungan variabel yang diteliti pada model yang dikembangkan peneliti. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh langsung Pengalaman PKL terhadap kesiapan Kerja pada peserta didik SMKN di Batang Hari.
2. Untuk menganalisis pengaruh langsung Berpikir Kreatif Terhadap Kesiapan Kerja peserta didik SMKN Di Batang Hari.
3. Untuk menganalisis pengaruh langsung Berpkir kritis terhadap kesiapan Kerja peserta didik SMKN di Batang Hari.
4. Untuk menganalisis pengaruh langsung Pengalaman PKL terhadap sikap

Profesional pada peserta didik SMKN di Batang Hari .

5. Untuk menganalisis pengaruh langsung Berpikir kreatif terhadap sikap Profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.
6. Untuk menganalisis pengaruh langsung Berpikir kritis terhadap sikap Profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.
7. Untuk menganalisis pengaruh langsung Sikap profesional terhadap kesiapan kerja peserta didik SMKN di Batang Hari
8. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Pengalaman PKL terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional pada peserta didik SMKN di Batang Hari.
9. Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Berpikir kreatif berpengaruh terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.
10. Untuk menganalisis pengaruh langsung Berpikir kritis terhadap kesiapan kerja dimediasi Sikap profesional peserta didik SMKN di Batang Hari.

1.5 Manfaat penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan pendidikan ekonomi, khususnya mengenai konsep kesiapan kerja, Sikap profesional, pengalaman PKL, berpikir kreatif, berpikir Kritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep untuk penelitian lanjutan yang relevan dalam rangka pengembangan teori dan konsep kesiapan kerja di satuan pendidikan kejuruan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran di dunia pendidikan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi guru

Penelitian ini akan menggambarkan capaian masing masing variable secara umum maupun secara khusus untuk masing masing peserta didik yang menjadi responden penelitian, apabilaketercapaian secara umum pada variable Kesiapan kerja, Sikap profesional, berpikir kreatif serta ketrampilan berpikir kritis rendah, mengindikasikan terjadi permasalahan yang harus diatasi melalui implementasi program PKL.

Hasil penelitian ini juga dapat menentukan jenis layanan serta materi yang akan di ajarkan kepada peserta didik sehingga pelaksanaannya lebih efektif. Selain itu hasil penelitian ini akan mendeskripsikan peserta didik-peserta didik yang terindikasi mengalami permasalahan yang terkait variabel penelitian dengan kategori tinggi/berat.

2. Kepala Sekolah Dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa penting untuk memahami kondisi anak, karena akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan mereka. Oleh sebab itu studi ini dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah dan dinas Pendidikan provinsi Jambi untuk lebih memperhatikan pelaksanaan program pkl di sekolah, misalnya dengan menempatkan peserta didik sesuai dengan bidang keahlian nya di dunia industri.